

Tim Gabungan Kasus Novel Dianggap Tak Independen

Anggota tim didominasi polisi.

KORAN TEMPO - 12 Jan '19.

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo.co.id

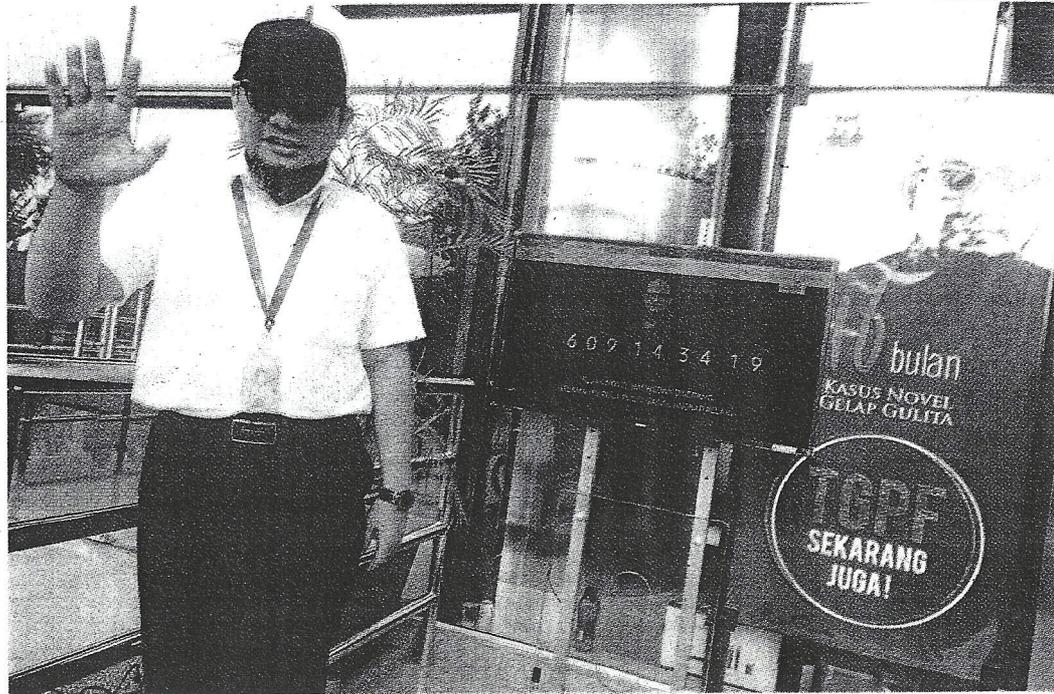
JAKARTA — Tim gabungan penindakan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, dianggap tidak independen. Anggota tim advokasi hukum Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa, mengatakan tim bentukan kepolisian itu tidak bisa dianggap independen karena terlalu kuat unsur kepolisian di dalamnya.

Mayoritas anggota tim berasal dari unsur kepolisian dan tim tersebut mesti bertanggung jawab kepada Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. "Beberapa ahli yang ada di dalamnya juga merupakan orang yang selama ini disinyalir selalu membelakapolisi, sehingga diragukan independensinya," kata Alghiffari kepada *Tempo*, kemarin.

Surat tugas tim gabung-

an penindakan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan ini ditandatangani oleh Tito pada 8 Januari lalu. Dalam lampiran surat bernomor Sgas/3/1/HUK.6.6./2019 itu, nama Tito tertera sebagai penanggung jawab tim yang berjumlah 65 orang tersebut. Tim diberi waktu kerja enam bulan untuk mengungkap kasus penyeraman air keras ke wajah Novel yang terjadi pada 11 April 2017.

Lampiran surat tugas itu juga menampilkan struktur tim gabungan yang terdiri atas berbagai kalangan. Dari total 65 anggota, 53 orang berasal dari kepolisian yang diambil dari Badan Reserse Kriminal Polri, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Detasemen Khusus Antiteror, Kepolisian Resor Jakarta Utara, hingga Pusat Laboratorium Forensik. Sedangkan 12 orang yang lain berasal dari



Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, 11 Desember 2018.

lain kepolisian, antara lain mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis, serta beberapa penyidik dan penyelidik KPK.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menilai pembentuk tim yang didominasi oleh polisi tak akan menghasilkan apa-apa. Sebab, sekitar 21 bulan sejak peristiwa penyerangan terhadap Novel, penyelidikan yang dilakukan kepolisian jalan di tempat. Karena itu,

muncul dorongan supaya Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan yang lebih independen yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Pembentukan tim gabungan ini juga terkesan politis karena mendekati tanggal pelaksanaan debat pertama pemilihan presiden 2019 yang akan digelar pada 17 Januari mendatang. Sebab, penindakan kasus ini telah berlarut-larut dan tak ada keputusan tegas dari Presiden Joko Widodo untuk pembentukan tim gabungan pencari fakta. Belakangan, penuntasan kasus Novel kerap dijadikan konsumsi lawan politik Jokowi. "Saya khawatir pembentukan tim

ini hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat pilpres," kata Haris.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pemimpin KPK telah menerbitkan surat tugas pegawai yang masuk daftar tim. Ia berharap adanya tim ini bisa mempercepat penuntasan kasus. "KPK berharap itu berujung pada penemuan pelaku," ujar Febri.

Nur Kholis mengatakan belum menerima surat tugas dari kepolisian. Namun ia telah mendapat undangan dari Polda Metro Jaya untuk ikut rapat tim gabungan pada Senin pekan depan. "Saya memang dihubungi dan dimohon kesediaan," ujar

Nur Kholis. Sedangkan Indriyanto dan Hendardi mengaku belum mendapat informasi mengenai masuknya nama mereka di tim tersebut. Adapun Poengky menolak berkomentar. "Tanya ke Mabes Polri saja," kata dia.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, mengatakan tim gabungan itu dibentuk untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 21 Desember tahun lalu. "Kami harus menindaklanjuti rekomendasi itu paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima," kata Iqbal.

● MAYA AYU PUSPITASARI | ROSSEN AJI NUGROHO | AGUNG SEDAWY